



**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2002  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan serta mewujudkan kesetaraan akses ekonomi, sosial dan keberdayaan masyarakat antar Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia dan antar Kawasan di wilayah timur Indonesia, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia telah menyusun Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
- b. bahwa Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan rencana tindak berupa program dan kegiatan untuk pembangunan di segala bidang;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, dipandang perlu menetapkan Instruksi Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 206);
5. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;

**MENGINSTRUKSIKAN :**

Kepada :

1. Para Menteri;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Para Gubernur/Bupati/Walikota di Kawasan Timur Indonesia.

Untuk :

- PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing dengan berkoordinasi dengan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.
- KETIGA** : Melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 27 November 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan

**KEPUTUSAN DEWAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2002  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
KAWASAN TIMUR INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa dengan memperhatikan Hasil Sidang Kabinet Terbatas mengenai Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, pada tanggal 26 Agustus 2002 dan upaya mewujudkan percepatan pembangunan, serta mewujudkan kesetaraan akses ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat antar Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia serta antara Kawasan Wilayah Timur Indonesia, perlu disusun kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
- b. bahwa Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.

Mengingat:

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan:

**KEPUTUSAN DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA  
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA.**

Pertama:

Menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana terantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia ini.

Kedua:

Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Keputusan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta

Pada tanggal 27 November 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU  
KETUA DEWAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN TIMUR INDONESIA

ttd  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

*LAMPIRAN*

## **KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) telah dimulai sejak awal tahun 1990-an yang ditandai dengan dicantulkannya substansi percepatan pembangunan KTI pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, pembentukan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia pada tahun 1993 dan terakhir pembentukan Kementrian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2000.

Percepatan Pembangunan KTI sesuai dengan GBHN dan program Pembangunan Nasional yang pada dasarnya mempunyai empat tujuan, yaitu (1) mengurangi ketimpangan regional; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat; (3) meningkatkan kesiapan KTI dalam menghadapi era perdagangan bebas; (4) mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat tujuan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka memacu pertumbuhan wilayah dan meningkatkan kualitas masyarakatnya.

Upaya percepatan pembangunan KTI dilakukan dalam lima bidang, yaitu: (1) bidang pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, serta pengembangan budaya; (2) bidang ekonomi melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta peningkatan daya beli masyarakat; (3) bidang prasarana dan sarana melalui penyediaan dan optimalisasi prasarana dan sarana; (4) bidang kelembagaan melalui penguatan dan melengkapi kelembagaan yang ada serta (5) bidang insentif melalui upaya pemberian insentif bagi investor yang membangun usaha di KTI. Usaha-usaha tersebut dikembangkan dengan tujuan agar KTI dapat mengejar ketertinggalannya.

Untuk mencapai tujuan di atas, diperlukan upaya-upaya percepatan, pemihakan, pemberdayaan, dan penguatan dalam bidang-bidang yang diprioritaskan guna menyerasikan dengan pertumbuhan antar wilayah di Indonesia.

Dalam rangka mengefektifkan pencapaian kebijakan di atas, diperlukan suatu kesamaan pandang dan langkah dari semua pelaku pembangunan yang

diformulasikan dalam kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Percepatan Pembangunan KTI.

#### 1.2. Kondisi Saat Ini

Kawasan Timu Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan kepulauan dengan luas wilayah daratan 1.293.215 kilometer persegi atau sebesar 67,91 persen dari seluruh wilayah Indonesia. Provinsi Papua mempunyai luas wilayah daratan paling besar (421.981 kilometer persegi) atau 32,45 persen dari luas KTI, sementara Provinsi Gorontalo memiliki luas daratan paling kecil (12.215 kilometer persegi) atau 0,94 persen dari luas wilayah KTI.

Wilayah Negara Indonesia mempunyai daerah yang berbatasan dengan 11 negara lain yang sebagian besar terletak di KTI. Pengelolaan daerah perbatasan tersebut masih rendah, seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sangihe Talaud, Halmahera, Keiru, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Jumlah penduduk KTI relatif sedikit dengan distribusi yang tidak merata. Berdasarkan data tahun 1999 penduduk KTI berjumlah 35.195.900 jiwa atau 20,04 persen dari total penduduk Indonesia dengan perkiraan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 29 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8.090.100 jiwa, sementara Provinsi Gorontalo dengan jumlah penduduk 840.386 jiwa merupakan yang terkecil. Kepadatan terbesar berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 190 jiwa per kilometer persegi, sementara yang terjarang adalah Provinsi Papua dengan kurang dari lima jiwa per kilometer persegi.

Kualitas sumberdaya manusia di KTI dapat dikategorikan masih di bawah rata-rata nasional. Menurut indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 1999, bahwa tujuh provinsi dari 12 provinsi di KTI memiliki IPM di bawah rata-rata nasional (tahun 1999 rata-rata IPM Indonesia sebesar 64). Pada tahun yang sama, dari 126 Kabupaten/Kota di KTI, 48 Kabupaten/Kota memiliki IPM di bawah rata-rata KTI (yang besarnya 62,9).

Hasil studi tahun 2001 menunjukkan tingkat pembangunan provinsi-provinsi di KTI relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata nasional. Pada tahun 1998, rata-rata IPD nasional adalah 4,4576, dan rata-rata IPD provinsi-provinsi di KBI adalah sebesar 4,6160.

Secara keseluruhan kondisi perekonomian KTI relatif tertinggal dibandingkan dengan KBI, yang ditunjukkan oleh rendahnya proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, porsi Investasi, dan porsi ekspor. Pada tahun 2000, porsi PDRB KTI hanya 18,99 persen dari keseluruhan PDRB nasional. Sedangkan PDRB perkapita total KTI (Rp. 2.037.781) lebih tinggi dibandingkan KBI (Rp. 1.947.758). Sebaliknya, PDRB per kapita tanpa sektor migas KBI lebih besar bila dibandingkan dengan KTI (Rp. 1.799.251 untuk KBI dan sebesar Rp. 1.748.737 untuk KTI). Selanjutnya, penanaman modal asing (PMA) KTI hanya sebesar 11,69 persen (realisasi 9 persen), sementara untuk persetujuan penanaman modal dalam negeri (PMDN) porsi KTI relatif besar yaitu sebesar 40,29 persen (realisasi 15 persen). Prosi ekspor total KTI pada tahun 2000 sebesar 17,70 persen, sementara untuk ekspor non-migas sebesar 12,59

persen. Untuk mempercepat pembangunan di KTI diperlukan upaya-upaya pemberian insentif bagi pemodal sebagai satu daya tarik agar sumberdaya alam dapat dikelola untuk secepat-cepatnya bagi kemakmuran rakyat.

Sumberdaya alam di KTI baik di daratan maupun di lautan mempunyai potensi yang sangat besar, namun pengelolaannya belum optimal. Diperkirakan 81,2 persen dari total cadangan bahan tambang Indonesia terdapat di KTI. Demikian juga dengan sumberdaya alam yang terbaru seperti kehutanan, perikanan dan obyek wisata laut. Pada tahun 1999, KTI memiliki hutan produksi sebesar 76,09 persen dari seluruh hutan produksi Indonesia. Sementara potensi perikanan KTI diperkirakan sebesar 3.022.927 ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 41 persen.

Kawasan Timur Indonesia yang luas kurang didukung oleh prasarana dan sarana fisik yang memadai, serta belum adanya akses langsung ke pasar Internasional. Hal ini dapat dilihat dari prasarana dan sarana transportasi, angka rasio elektrifikasi dan densitas telepon. Pada tahun anggaran 197/1998 rasio elektrifikasi KTI sebesar 47,74 persen sementara di KBI sebesar 76,16 persen. Pada tahun anggaran 1998/1999 densitas telepon di KTI sebesar 2,72 satuan sambungan telepon per 100 penduduk, sementara densitas telepon di KBI sebesar 5,24 persen satuan sambungan telepon per 100 penduduk. Pada tahun yang sama, rasio panjang jalan dengan luas wilayah di KTI sebesar 0,110 kilometer per kilometer persegi, sementara KBI sebesar 0,375 kilometer per kilometer persegi. Sebagian besar provinsi di KTI memiliki kelembagaan pemerintahan dan masyarakat yang relatif rendah. Hal ini ditunjukkan dengan lemahnya penanganan terhadap konflik-konflik sosial (horizontal dan vertikal) dan rendahnya tingkat keberdayaan pemerintah dan masyarakat. Lemahnya penanganan konflik-konflik tersebut ditunjukkan oleh belum terselesaikannya kasus di Provinsi Maluku, Papua, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Data tahun 1998 menunjukkan hanya terdapat tiga provinsi di KTI yang tingkat keberdayaan pemerintahannya masuk dalam urutan 10 besar, sementara pada tahun yang sama hanya dua provinsi yang masuk dalam urutan 10 besar untuk tingkat keberdayaan masyarakatnya.

Ketertinggalan KTI dibandingkan KBI sebagaimana diuraikan di atas, juga terjadi di dalam lingkup internal KTI. Ketertinggalan perkembangan wilayah meliputi produktivitas yang relatif rendah, peran serta masyarakat, dan swasta yang belum optimal, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tingkat pembangunan daerah, kondisi perekonomian wilayah, kondisi prasarana dan sarana serta kelambagaan yang belum memadai.

### 1.3. Permasalahan

Kondisi KTI saat ini, sebagaimana diuraikan di atas memberikan gambaran bahwa permasalahan utama KTI adalah ketidaksetaraan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan sebagai dampak dari terjadinya perbedaan percepatan pembangunan dengan kawasan lainnya yang selama ini dilaksanakan.

### 1.4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

#### 1.4.1. Visi

Berlandaskan pada kondisi KTI yang relatif tertinggal dibandingkan dengan KBI dan dalam rangka mengantisipasi kecenderungan perkembangan perekonomian global, maka visi percepatan pembangunan KTI hingga tahun 2010 adalah:

*Terwujudnya Kawasan Timur Indonesia sebagai kawasan yang maju, berkelanjutan, mempunyai kesetaraan akses ekonomi dan keberdayaan antarkawasan serta menjadi bagian tataana global dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Didalam pernyataan visi percepatan pembangunan KTI di atas yang dimaksud dengan:

**Maju;** berarti bahwa upaya percepatan pembangunan harus diarahkan untuk mentransformasi tingkat pembangunan saat ini menuju tingkatan yang lebih tinggi disertai peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat KTI.

**Berkelanjutan;** berarti bahwa percepatan pembangunan KTI harus memperhatikan aspek keberlanjutan baik keberlanjutan ekonomi, kesejahteraan sosial maupun lingkungan.

**Kesetaraan Akses Ekonomi;** berarti bahwa sistem perekonomian yang akan dikembangkan adalah sistem yang terbuka dan didukung oleh adanya desentralisasi pengaturan ekonomi bagi daerah-daerah di KTI.

**Keberdayaan;** berarti bahwa kawasan tersebut mempunyai daya saing yang tinggi untuk dapat ikut mengambil peran dalam tatanan global.

**Tatanan Global;** berarti sistem yang berlaku secara umum di tingkat nasional maupun internasional.

**Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;** berarti bahwa upaya percepatan pembangunan KTI tidak boleh mengarah pada proses disintegrasi bangsa, namun harus selalu menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 1.4.2. Misi

Untuk mencapai visi di atas, maka misi percepatan pembangunan KTI adalah:

1. Memacu pertumbuhan ekonomi regional secara integratif;
2. Mengembangkan sumberdaya manusia setempat agar dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pemaungan KTI;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pembangunan dengan pemberdayaan lembaga ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah yang saling menguntungkan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan antar wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI);
5. Mengoptimalkan kerjasama ekonomi sub regional;
6. Meningkatkan investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun asing;
7. Memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana berdasarkan asa konservasi agar lestari dan ditujukan bagi kesejahteraan, terutama masyarakat di sekitarnya.

#### 1.4.3. Tujuan

Tujuan percepatan pembangunan KTI adalah:

1. Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial regional antara KTI dengan KBI dan intra KTI;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta serta kesejahteraan masyarakat setempat;
3. Meningkatkan kesiapan KTI menghadapi era perdagangan bebas dengan akulturasi budaya dan penguasaan teknologi;
4. Mewujudkan interdependensi antar kawasan dalam kerangka NKRI;
5. Mempercepat dan memantapkan pemulihan ekonomi di KTI.

#### 1.4.4. Sasaran

Berdasarkan periodisasi pembangunan Indonesia, maka percepatan pembangunan KTI dibagi kedalam dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek (sampai dengan tahun 2004) dan sasaran jangka menengah (sampai dengan tahun 2010).

##### **Sasaran sampai dengan tahun 2004:**

1. Tercapainya pendapatan perkapita mendekati rata-rata nasional;
2. Tercapainya Indeks Pembangunan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia mendekati rata-rata nasional;
3. Tercapainya peningkatan porsi investasi berkisar 20 persen dari total investasi nasional dan ekspor KTI meningkat sekitar 20 persen;
4. Tercapainya kesiapan kelembagaan pemerintah, ekonomi, dan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus Papua secara berdayaguna dan berhasilguna;
5. terselesaikannya konflik-konflik horisontal yang saat ini terjadi;
6. Tercapainya pengembangan sistem nasional jangka menengah di KTI yang merupakan penetapan kawasan dan kota prioritas yang dijabarkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

##### **Sasaran sampai dengan tahun 2010:**

1. Tercapainya daya beli berada pada rata-rata nasional;
2. Tercapainya Indeks Pembangunan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia berada pada rata-rata nasional;
3. Tercapainya porsi investasi di atas 20 persen dari total investasi nasional dan ekspor dari KTI tumbuh di atas 20 persen
4. Tertata dan mantapnya kelembagaan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pemerintahan dalam mempercepat pembangunan KTI;
5. Tercapainya pengembangan sistem nasional jangka panjang di KTI yang merupakan penetapan kawasan dan kota prioritas yang dijabarkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
6. Tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

## **BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI**



### 2.1. Kebijakan

Dalam rangka mempercepat pembangunan KTI, maka perlu ditetapkan kebijakan berupa: (1) pemihakan; (2) percepatan; (3) peningkatan; (4) penyerasian; (5) pengembangan; (6) pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan KTI.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut ditempuh strategi yang bersifat umum dan khusus. Strategi umum merupakan strategi yang berlaku untuk seluruh KTI, sedangkan strategi khusus merupakan strategi yang didasarkan pada karakteristik dan kondisi masing-masing daerah.

### 2.2. Strategi Umum

Dalam rangka pencapaian sasaran jangka pendek maupun jangka menengah, maka strategi percepatan pembangunan KTI adalah:

1. Pembangunan KTI dikembangkan secara terpadu lintas wilayah administrasi dan lintas sektor dengan berpedoman pada RTRW nasional, RTRW pulau, dan RTRW provinsi;
2. Peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis yaitu sektor yang menghasilkan nilai tambah besar dan mempunyai sumbangan yang besar terhadap total nilai ekspor dan perolehan devisa dengan prinsip KTI sebagai sentra pendukung ketahanan pangan nasional, sentra pengembangan kelautan, sentra pengembangan sumberdaya alam yang berorientasi ekspor;
3. Peningkatan pemerataan pendapatan, hasil-hasil pembangunan, dan akses ekonomi serta akses pasar dengan mendorong simpul-simpul utama KTI sebagai pusat hubungan ekonomi, baik dalam maupun luar negeri terutama kawasan Pasifik dan negara-negara tetangga;
4. Mendorong Pemerintah Daerah untuk memperbesar alokasi dana untuk peningkatan kesehatan dan pendidikan;
5. Peningkatan daya tarik investasi dengan pengembangan kawasan cepat tumbuh (kawasan andalan, kawasan andalan laut, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan sentra produksi, dan investasi, kepastian hukum, jaminan keamanan serta mengurangi ketidak konsistenan pertauran;
6. Pengembangan kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan sebagai kawasan depan yang dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan, khususnya untuk kawasan perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, melalui peningkatan aksesibilitas dan percepatan pencapaian kesetaraan pengembangan wilayah termasuk dengan negara tetangga;
7. Menciptakan suasana yang kondusif untuk mendorong inisiatif dan partisipatif aktif masyarakat, sehingga terjalin kemitraan antara Pemerintah, Swasta, dan masyarakat dalam pengembangan usaha terutama untuk usaha kecil dan menengah (UKM);
8. Peningkatan peran dan kerjasama antar kelembagaan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan KTI;
9. Optimalisasi dan perluasan prasarana dan sarana dengan mengacu kepada rencana tata ruang.

## 2.3. Strategi Khusus

Kawasan Timur Indonesia merupakan kawasan dengan heterogenitas tinggi baik dari segi sumberdaya alam, tingkat perkembangan dan pembangunan, etnik dan sosial budaya, sehingga dalam menentukan strategi khusus yang akan digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

### 2.3.1. Sumberdaya Manusia

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah adalah kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia adalah Indeks Pembangunan manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan tiga aspek utama yang terkait dengan kualitas sumberdaya manusia, yaitu: (1) aspek pendidikan ditunjukkan dengan tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah; (2) aspek kesehatan, ditunjukkan dengan angka harapan hidup, angka kematian bayi waktu lahir, dan angka kematian ibu saat melahirkan; serta (3) aspek ketenagakerjaan ditunjukkan dengan pengeluaran untuk konsumsi per tahun.

Berdasarkan tingkat IPM tersebut, maka karakteristik sumber daya manusia untuk masing-masing daerah KTI adalah sebagai berikut: (1) kualitas sumber daya manusia rendah; (2) Kualitas sumberdaya manusia sedang, dan (3) Kualitas sumberdaya manusia baik. Berdasarkan karakteristik sumberdaya manusia dimasing-masing daerah, ditentukan kebijakan dan strategi pengembangannya sebagai berikut:

1. Daerah dengan kualitas sumberdaya manusia rendah diterapkan kebijakan percepatan. Percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui percepatan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan SD, SLTP dan sejenisnya, pembebasan SPP untuk SD, SLTP dan yang sejenisnya, serta pengawasan terhadap anak usia sekolah; peningkatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan memberikan bantuan khusus kesehatan di daerah miskin; peningkatan tenaga kerja lokal dengan pemangangan dana pemberian kuota terhadap tenaga kerja lokal di industri.
2. Daerah dengan kualitas sumberdaya manusia sedang diterapkan kebijakan pemberdayaan. Pemberdayaan terhadap SDM KTI dilakukan melalui pendirian sekolah unggulan dan kejuruan yang dilaksanakan dengan pembangunan sekolah unggulan di daerah Kabupaten/Kota dan di daerah perbatasan yang setara dengan negara tetangga serta pembangunan 17 sekolah Menengah Kejuruan; peningkatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan penempatan satu dokter dan bidan di setiap desa; peningkatan kualitas tenaga kerja lokal dilakukan dengan melaksanakan pelatihan berbasis komunitas dan menambah Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) dengan menggunakan dana Jaminan Sosial Tenaga kerja (Jamsostek).

3. Daerah dengan kualitas sumberdaya manusia baik diterapkan kebijakan penguatan. Penguatan kualitas sumber daya manusia KTI dilakukan melalui pendirian/pembentukan politeknik dengan membuka jurusan yang sesuai dengan sumberdaya alam setempat dan peningkatan kualitas universitas setempat dengan melakukan pertukaran dosen universitas setempat dengan universitas yang lain atau universitas di KBI; peningkatan pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan percepatan pelaksanaan puskesmas keliling mengunjungi setiap desa minimal satu kali sebulan; peningkatan kualitas tenaga kerja lokal yang dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha menggunakan dana Jamsostek dan pemberian bea siswa pada mahasiswa di bidang yang sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan setempat.

Berdasarkan kebijakan dan strategi di atas, maka program prioritas pembanaganan bidang sumberdaya manusia seperti tercantum dalam Tabel 4.1

#### 2.3.2. Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Struktur perekonomian KTI sebagian besar didominasi oleh kegiatan ekstraksi sumberdaya alam. Beberapa daerah di KTI yang memiliki tingkat perekonomian relatif tinggi, umumnya adalah daerah-daerah dengan potensi sumberdaya alam yang besar. Sebagai contoh, Propinsi Papua lebih kurang 80 persen dari total PDRB berasal dari sektor pertambangan. Hal yang sama terjadi pada Propinsi Kalimantan Timur, lebih kurang 60 persen dari total PDRB berasal dari sektor pertambangan. Perekonomian KTI yang tergantung pada eksploitasi sumberdaya alam dalam jangka pendek tidak dapat dihindari. Namun dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, ketergantungan ekonomi pada satu jenis komoditas secara berangsur-angsur harus dikurangi. Sudah saatnya memanfaatkan sumberdaya alam yang terbarukan dan potensial di KTI seperti perikanan, kehutanan dan obyek wisata. Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih berkelanjutan, maka harus diupayakan dua hal utama, yaitu :

- (1) melakukan eksploitasi sumberdaya alam termasuk kelautan dan potensi keanekaragaman hayati dalam batas-batas lestari (apabila sumberdaya alam tersebut merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui, maka hasil eksploitasinya sebagian digunakan mencari cadangan baru atau mengembangkan komoditas pengganti), dan
- (2) penganekaragaman ekonomi baik horisontal maupun vertikal.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi empat karakteristik daerah di KTI yang pembangunannya akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi percepatan sebagai berikut :

1. Daerah dengan potensi rendah dan penganekaragaman rendah, diterapkan kebijakan pengembangan sumberdaya secara berkelanjutan dengan strategi pemanfaatan sumberdaya alam yang

- berpihak pada masyarakat lokal dengan melibatkan pihak-pihak terkait; pengembangan agroindustri berbasis sumberdaya terbaru; pengelolaan usaha penambangan berwawasan lingkungan, pengembangan energi baru dan terbarukan, dan pemanfaatan sumberdaya alam yang mengutamakan pendekatan ekosistem.
2. Daerah dengan potensi rendah dan penganeekaragaman tinggi, diterapkan kebijakan peningkatan daya saing dan daya tarik investasi dengan strategi penetapan standardisasi dan peningkatan mutu produksi; pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan; pengupayaan harga-harga produksi berada pada harga pasar yang wajar dan pemberian insentif bagi usaha pengelolaan sumberdaya alam yang lestari.
  3. Daerah dengan potensi tinggi dan penganeekaragaman rendah diterapkan kebijakan peningkatan keanekaragaman produk hasil pengolahan dan pelestarian sumberdaya alam dengan strategi penganeekaragaman horisontal bagi produk-produk yang mempunyai nilai tambah dan permintaan pasar tinggi dan penganeekaragaman produk sumberdaya alam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
  4. Daerah dengan potensi tinggi dan penganeekaragaman tinggi ditetapkan kebijakan peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi produk-produk sumberdaya alam yang mempunyai nilai tambah dan permintaan pasar tinggi baik di dalam maupun luar negeri; serta peningkatan akses pasar, sistem distribusi dan pemasaran.

Berdasarkan kebijakan dan strategis di atas, maka program prioritas pembangunan bidang perekonomian dan sumberdaya alam seperti tercantum dalam Tabel 4.2.

#### 2.3.3. Prasarana dan Sarana

Ketersediaan prasarana dan sarana wilayah merupakan faktor penunjang pengembangan wilayah. Oleh sebab itu, secara garis besar kebijakan penyediaan prasarana dibagi menjadi dua kelompok.

Pertama, untuk daerah-daerah yang relatif memiliki prasarana tinggi, kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan penyerasian dan pengoptimalan serta penguatan pembangunan prasarana dan sarana yang ada.

Kedua, untuk daerah-daerah yang memiliki prasarana rendah, kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan prasarana dan sarana. Namun prioritas pembangunan lebih ditekankan pada daerah-daerah tertinggal termasuk daerah perbatasan dan kawasan andalan termasuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET). Berdasarkan sasaran jangka pendek (2004) maupun sasaran jangka menengah (2010), penerapan kebijakan dan strategi penyediaan prasarana dan sarana disesuaikan dengan karakteristik daerah atau wilayah yang bersangkutan.

Adapun kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana di KTI adalah sebagai berikut :

1. Penerapan strategi optimalisasi pembangunan prasarana dan sarana dimaksud untuk meningkatkan efisiensi penggunaan prasarana yang selama ini dirasa masih rendah. Upaya ini dilakukan dengan menambah sarana melalui promosi dan penggalangan investasi, serta peningkatan koordinasi antarsektor.
2. Sedangkan strategi penguatan pembangunan prasarana dan sarana berorientasi keluar daerah, antara lain dengan mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi serta kerjasama antar daerah.
3. Kebijakan percepatan pembangunan prasarana dimaksud untuk meningkatkan jumlah maupun kualitas prasarana yang dirasa masih kurang strategi yang diterapkan antara lain dengan menambah investasi pemerintah dan meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal dan daerah perbatasan.
4. Kebijakan perluasan pembangunan prasarana diarahkan pada daerah yang mempunyai kinerja ekonomi tinggi.

Diantara program-program percepatan pembangunan KTI, terdapat tiga program yang perlu mendapat prioritas dalam pelaksanaannya, yaitu :

- (1) program penambahan kapasitas bandara,
- (2) program pengembangan sumberdaya energi dan
- (3) program pengembangan kawasan unggulan wisata.

Program penambahan kapasitas bandara ditindaklanjuti dengan kegiatan optimalisasi pemanfaatan bandara untuk penerbangan malam hari. Program pengembangan sumberdaya energi ditindaklanjuti melalui tiga kegiatan sebagai berikut : pembuatan pedoman pelaksanaan penjualan listrik swasta; pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, air dan sumberdaya lokal. Sedangkan program pengembangan kawasan unggulan wisata dijabarkan dengan kegiatan peningkatan aksesibilitas daerah tujuan wisata.

Memperhatikan kebijakan dan strategi di atas, maka program prioritas pembangunan bidang prasarana dan sarana seperti tercantum dalam Tabel 4.3.

#### 2.3.4. Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung percepatan pembangunan KTI. Aspek kelembagaan yang dikembangkan, antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait kelembagaan. Aspek peraturan perundang-undangan ini mencakup materi peraturan yang dijadikan dasar untuk dilaksanakan, tidak menimbulkan kerancuan atau tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lain, dan dapat menciptakan rasa keadilan, serta memberikan kepastian hukum.
2. Operasionalisasi kelembagaan dalam masyarakat. Aspek ini mencakup mekanisme dan tata kerja kelembagaan yang lebih efektif dan efisien, lebih demokratis dan terbuka, lebih rasional dan fleksibel serta lebih

bersifat terdesentralisasi. Sedangkan bentuk kelembagaan yang menjadi prioritas pengembangan untuk kecepatan pembangunan KTI meliputi lembaga ekonomi, lembaga pemerintahan dan lembaga sosial masyarakat.

Berdasarkan kedua aspek pengembangan kelembagaan di atas, maka karakteristik kelembagaan percepatan pembangunan KTI dikaji menurut bobot keberdayaan lembaganya, yaitu tingkat keberdayaan lembaga pemerintahan mempunyai nilai bobot memadai dan kurang memadai. Sedangkan tingkat keberdayaan lembaga ekonomi, sosial dan masyarakat mempunyai nilai bobot memadai dan kurang memadai.

Memperhatikan nilai pembobotan tersebut kemudian ditentukan kebijakan dan strategi pengembangan lembaga ekonomi, lembaga pemerintahan, dan lembaga sosial masyarakat, sebagai berikut :

1. Tingkat keberdayaan lembaga pemerintah daerah kurang memadai, diterapkan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menerapkan strategi penataan kembali (restrukturisasi) dan penguatan organisasi lembaga pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan lokal;
2. Tingkat keberdayaan lembaga pemerintah daerah memadai, diterapkan kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan dengan menerapkan strategi revitalisasi lembaga pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Tingkat keberdayaan lembaga ekonomi, sosial dan masyarakat kurang memadai, diterapkan kebijakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menerapkan strategi pengembangan lembaga ekonomi, sosial dan masyarakat;
4. Tingkat keberdayaan lembaga ekonomi, sosial dan masyarakat memadai, diterapkan kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan dengan menerapkan strategi pengoptimalan lembaga ekonomi, sosial dan masyarakat.

Berdasarkan kebijakan dan strategi di atas, maka program prioritas pembangunan bidang kelembagaan seperti tercantum dalam Tabel 4.4.

### **BAB III PELAKSANAAN**

Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan KTI ini merupakan pedoman bagi pembangunan KTI yang pelaksanaannya memerlukan komitmen bersama yang serius, terpadu dan konsisten dari para pihak pembangunan. Guna keberhasilan pelaksanaan Jakstranas Percepatan Pembangunan KTI, diambil langkah-langkah sebagai berikut :

#### **3.1 Penentuan Program Prioritas**

Program prioritas pembangunan ditentukan atas dasar Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan KTI, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan program lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sesuai dengan dinamika pembangunan.

#### **3.2 Rencana Tindak**

Setiap program prioritas dijabarkan dalam bentuk rencana tindak yang memuat kegiatan, wilayah, instansi terkait dan sumber pendanaannya. Penyusunan rencana tindak ini dilakukan oleh :

- a. Instansi/lembaga pemerintah non departemen (LPND) terkait disesuaikan dengan mekanisme perencanaan pembangunan.
- b. Pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang terlebih dahulu menetapkan tipologi/karakteristik daerah sesuai dengan Jakstranas Percepatan Pembangunan KTI.

Instansi/LPND dan pemerintah daerah terkait melakukan sinkronisasi terhadap rencana tindak yang disusun, yang perumusannya berkoordinasi dengan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. Sedangkan realisasi rencana tindak dikoordinasikan oleh Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

### 3.3 Kelembagaan

1. Dalam rangka menjaga konsistensi, komitmen dan keterpaduan percepatan pembangunan KIT, maka Jakstranas Percepatan Pembangunan KTI ini ditetapkan dalam bentuk keterapan yang mengikat semua departemen/LPND dan pemerintah daerah terkait untuk melaksanakannya.
2. Pelaksanaan percepatan pembangunan KTI juga melibatkan lembaga-lembaga yang telah dibentuk sebelumnya seperti Kerjasama Ekonomi Sub Regional (Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area/BIMP-EAGA, Australia Indonesia Development Area/AIDA, Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle/IMS-GT), Badan Pengembangan KAPET, Dewan Maritim Indonesia, Dewan Ketahanan Pangan, Komite Penanggulangan Kemiskinan, Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Forum Kerjasama Regional yang meliputi Kepulauan Kalimantan, Kepulauan Sulawesi, dan kepulauan timur lainnya.
3. Untuk memperkuat pelaksanaan percepatan pembangunan KTI perlu dibentuk jejaring antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta masyarakat dan lembaga lain.

### 3.4 Pendanaan.

Sumber pendanaan pelaksanaan Jakstranas Percepatan Pembangunan KTI diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana perbantuan, dana dekonsentrasi, danan desentralisasi (Dana Alokasi Khusus, Daya Alokasi Umum, dana bagi hasil), dana kapitalisasi usaha sumberdaya alam, dana penyisihan keuntungan Badan Usaha Milik Negara dan dana daerah. Dalam penetapan besaran pendanaan untuk mempercepat pembangunan KTI diperlukan sikap politik yang menganggap bahwa investasi di kawasan tersebut tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi saja.

Dengan mempertimbangkan kondisi pendanaan pemerintah yang terbatas, maka penanan masyarakat termasuk swasta diharapkan menjadi komponen terbesar dalam penyediaan pendanaan pembangunan KTI. Untuk itu, diperlukan kebijakan khusus berupa insentif kepada investor agar melakukan investasi di KTI.

## **BAB IV PROGRAM PRIORITAS**

Program prioritas pembangunan ditentukan atas dasar Kebijakan dan Strategis Nasional Percepatan Pembangunan KTI, dan program lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia disesuaikan dengan dinamika pembangunan. Adapun rumusan program prioritas percepatan pembangunan KTI memuat : program, kegiatan, wilayah, waktu pelaksanaan dan instansi terkait. Program prioritas pembangunan secara lengkap dari bidang sumberdaya manusia, perekonomian dan sumber daya alam, prasarana dan sarana, serta kelembagaan tercantum secara berturut-turut dalam Tabel 4.1, Tabel 4.3 dan Tabel 4.4..

TABEL 4.1.  
PROGRAM PRIORITAS BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

No	Program	Kegiatan	Wilayah	Waktu Pelaksanaan	Instansi Terkait (* Koodinator)
1.	Percepatan pelaksanaan wajib belajar 9 Tahun	↳ Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan SD dan SLTP dan yg sejenis  ↳ Pembebasan biaya SPP untuk SD dan SLTP dan yg sejenis  ↳ Pengadaan/pemberian bantuan buku pelajaran SD dan SLTP dan yang sejenis  ↳ Peningkatan pengawasan terhadap anak usia sekolah	↳ KTI  ↳ KTI  ↳ KTI  ↳ KTI	↳ Selesai tahun 2006  ↳ Selesai tahun 2006 ↳ Mulai Tahun 2003  ↳ Mulai Tahun 2003	↳ Depdiknas * ↳ Depag ↳ Pemda  ↳ Depdiknas * ↳ Depag ↳ Pemda  ↳ Depdiknas * ↳ Depag ↳ Pemda  ↳ Depdiknas * ↳ Depag ↳ Pemda
2.	Pendidikan sekolah unggulan dan kejuruan	↳ Pembangunan sekolah di daerah perbatasan yg setara dgn negara tetangga  ↳ Pembangunan sekolah unggulan kabupaten/kota  ↳ Percepatan pembangunan 17 SMK	↳ Kaltim (nunukan) ↳ Kalbar (Sangau) ↳ Sulut (Sangihe Talaud)  ↳ Setiap Kabupaten / Kota  ↳ KTI	↳ Selesai Tahun 2004  ↳ Mulai Tahun 2003  ↳ Mulai Tahun 2003	↳ Depdiknas * ↳ Depag ↳ Pemda  ↳ Depdiknas * ↳ BPPT ↳ Pemda  ↳ Depdiknas * ↳ Pemda
3.	Pendirian/pemben-tukan politeknik	↳ Membuka politeknik di universitas setempat yg sesuai dgn potensi sumberdaya alam (bagi yg belum ada)	↳ KTI	↳ Mulai Tahun 2003	↳ Depdiknas * ↳ Universitas/PT ↳ Pemda
4.	Peningkatan kualitas universitas setempat	↳ Pertukaran dosen dgn universitas lain atau universitas di KBI  ↳ Kerjasama dgn	↳ KTI  ↳ KTI	↳ Mulai Tahun 2003  ↳ Mulai	↳ Depdiknas * ↳ Depag ↳ Universitas/PT ↳ Pemda  ↳ Depdiknas *



		<p>perguruan tinggi di Jawa/luar negeri untuk persiapan pendirian jurusan baru</p> <p>↳ Kerjasama penelitian pada bidang penelitian yg disesuaikan dgn kebutuhan lokal</p>		<p>Tahun 2003</p> <p>↳ Mulai Tahun 2003</p>	<p>↳ Depag</p> <p>↳ Universitas/PT</p> <p>↳ Pemda</p> <p>↳ Depdiknas *</p> <p>↳ Depag</p> <p>↳ Universitas/PT</p> <p>↳ Kem Ristek</p>
5.	Peningkatan kesempatan belajar di universitas/PT	<p>↳ Beasiswa pada mahasiswa di bidang yg sesuai dgn potensi sumberdaya alam dan kebutuhan lokal</p> <p>↳ Peningkatan kuota PMDK calon mahasiswa dari KTI ke PTN di Jawa</p>	<p>↳ KTI</p> <p>↳ KTI</p>	<p>↳ Mulai Tahun 2003</p> <p>↳ Mulai Tahun 2003</p>	<p>↳ Depdiknas *</p> <p>↳ Pemda</p> <p>↳ Universitas/PT</p> <p>↳ Depdiknas *</p> <p>↳ Universitas/PT</p>
6.	Peningkatan pelayanan kesehatan	<p>↳ Setiap desa miskin mendapat bantuan khusus kesehatan</p> <p>↳ Puskesmas keliling mengunjungi setiap desa minimal satu kali sebulan</p> <p>↳ Penempatan satu dokter pegawai tdk tetap di setiap Puskesmas</p> <p>↳ Pengadaan obat-obat generik/terjangkau untuk setiap puskesmas</p> <p>↳ Penempatan minimal 1 orang bidan desa di setiap desa</p> <p>↳ Penyediaan sarana dan prasarana Poliklinik desa</p> <p>↳ Peningkatan insentif bagi bidan desa</p>	<p>↳ KTI</p> <p>↳ KTI</p> <p>↳ KTI</p> <p>↳ KTI</p> <p>↳ KTI</p> <p>↳ KTI</p> <p>↳ KTI</p>	<p>↳ Mulai Tahun 2003</p> <p>↳ Mulai Tahun 2003</p> <p>↳ Mulai Tahun 2003</p> <p>↳ Mulai Tahun 2003</p> <p>↳ Mulai Tahun 2003</p> <p>↳ Mulai Tahun 2003</p> <p>↳ Mulai Tahun 2003</p>	<p>↳ Depkes *</p> <p>↳ Pemda</p> <p>↳ Depkes *</p> <p>↳ Pemda</p> <p>↳ Depkes *</p> <p>↳ Depkes *</p> <p>↳ Depkes *</p> <p>↳ Pemda</p> <p>↳ Depkes *</p> <p>↳ Pemda</p> <p>↳ Depkes *</p> <p>↳ Pemda</p>
7.	Peningkatan gizi keluarga	<p>↳ Sosialisasi makanan lokal bergizi tinggi</p> <p>↳ Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, anak, balita dan usia sekolah</p> <p>↳ Pemanfaatan perkarangan untuk tanaman buah dan sayuran</p>	<p>↳ KTI</p> <p>↳ KTI</p> <p>↳ KTI</p>	<p>↳ Mulai Tahun 2003</p> <p>↳ Mulai Tahun 2003</p> <p>↳ Mulai Tahun 2003</p>	<p>↳ Depkes *</p> <p>↳ Pemda</p> <p>↳ Kem Ristek</p> <p>↳ Depkes *</p> <p>↳ Pemda</p> <p>↳ Depkes *</p> <p>↳ Pemda</p>
8.	Peningkatan kesempatan kerja	<p>↳ Pembinaan dan perlindungan tenaga</p>	<p>↳ NTB</p> <p>↳ NTT</p>	<p>↳ Mulai Tahun</p>	<p>↳ Depnakertrans *</p> <p>↳ Deplu</p>

		kerja dari KTI untuk bekerja ke luar negeri		2003	↳ Depkeh & Ham ↳ Pemda
		↳ Bantuan modal dgn menggunakan Jamsostek	↳ KTI	↳ Mulai Tahun 2003	↳ Depnakertrans * ↳ Kem. BUMN
		↳ Kuota tenaga kerja lokal untuk industri dan perusahaan-perusahaan baru	↳ KTI	↳ Mulai Tahun 2003	↳ Depnakertrans * ↳ Depperindag ↳ Pemda
9.	Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal	↳ Pemagangan dalam dan luar negeri	↳ KTI	↳ Mulai Tahun 2003	↳ Depnakertrans * ↳ Depperindag
		↳ Masyarakat berbasis pelatihan	↳ KTI	↳ Mulai Tahun 2003	↳ Depnakertrans * ↳ Depperindag
		↳ Pelatihan-pelatihan pemanfaatan teknologi tepatguna 2003	↳ KTI	↳ Mulai Tahun 2003	↳ Depnakertrans * ↳ Kem. Ristek BPPT/ LIPI/BATAN ↳ Pemda
		↳ Menambah dan meningkatkan kinerja BLKI dgn memanfaatkan dana Jamsostek	↳ KTI	↳ Mulai Tahun 2003	↳ Depnakertrans * ↳ Kem. BUMN ↳ Pemda
		↳ Peningkatan kewirausahaan	↳ KTI	↳ Mulai Tahun 2003	↳ Depnakertrans * ↳ Kem. Ristek ↳ BPPT/ LIPI ↳ Pemda

**TABEL 4.2.**  
**PROGRAM PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM**

No	Program	Kegiatan	Wilayah	Waktu Pelaksanaan	Instansi Terkait (* Koodinator)
1.	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam.	↳ Penataan regulai dan tata ruang pengelolaan sumberdaya alam.	↳ KTI	↳ Mulai tahun 2003	↳ BKTRN * ↳ Depkimpraswil ↳ Dephut ↳ DESDM ↳ DKP
		↳ Penyelesaian permasalahan penambangan di hutan lindung	↳ KTI	↳ Selesai tahun 2002	↳ DESDM * ↳ Dephut ↳ Kem. LH
		↳ Penataan dan rehabilitasi lahan bekas tambang	↳ KTI	↳ Mulai Tahun 2003	↳ DESDM * ↳ BPN ↳ Pemda ↳ Kem. LH
		↳ Pengembangan industri pada wilayah yang mempunyai sumberdaya alam	↳ KTI	↳ Mulai Tahun 2003	↳ Depperindag * ↳ Deptan ↳ Dephut ↳ DesDM ↳ DKP ↳ BPPT
2.	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk	↳ Pemberian insentif bagi pengelola sumberdaya	↳ KTI	↳ Mulai Tahun	↳ BKPM * ↳ DESDM

	pengembangan sumberdaya alam.	alam yg bermitra dgn masyarakat lokal.		2003	↳ Depkeu ↳ Deptan ↳ DKP ↳ Dephut ↳ Kem. LH ↳ Pemda ↳ Kem. Budpar * ↳ Dephut ↳ Pemda
3.	Pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir	↳ Pengembangan wisata alam dan budaya yang melibatkan masyarakat ↳ Pengembangan budidaya perikanan laut. ↳ Pengadaan peningkatan sarana gudang pendingin pada pusat pendaratan ikan. ↳ Pemberdayaan BUMN di bidang perikanan. ↳ Pengembangan industri perikanan terpadu dan industri maritim (kawasan andalan laut) ↳ Pendirian loka dan balai perikanan baru ↳ Rehabilitasi lingkungan terumbu karang	↳ KTI ↳ Bitung, sorong, Saumlaki, Kupang, Kendari, merauke, Ternate dan Tabulo ↳ KTI ↳ Bitung, Sorong, Biak, Manokwari, ambon, kendari dan Kupang ↳ KTI ↳ Sulut ↳ NTB	↳ Mulai Tahun 2003 ↳ Mulai Tahun 2003 ↳ Mulai Tahun 2003 ↳ Mulai Tahun 2003 ↳ Mulai Tahun 2003 ↳ Mulai Tahun 2003	↳ DKP * ↳ BPPT ↳ LIPI ↳ LAPAN ↳ Pemda ↳ DKP * ↳ Dephub ↳ Pemda ↳ Kem. BUMN * ↳ DKP ↳ DKP * ↳ Depkimpraswil ↳ Depperindag ↳ BPPT ↳ Pemda ↳ DKP * ↳ Pemda ↳ DKP * ↳ Dephut ↳ Kem. LH ↳ LIPI ↳ Pemda
4.	Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya hutan.	↳ Penyelesaian padu serasi antara tata ruang dan tata guna hutana kesepakatan ↳ Pemanfaatan kayu gelondongan jenis merbau dgn relokasi industri penggergajian kayu dari jawa timur. ↳ Rehabilitasi lahan gambut	↳ Kalteng ↳ Papua ↳ Kalteng	↳ Selesai Tahun 2003 ↳ Selesai Tahun 2003 ↳ Mulai Tahun 2003	↳ Dephut * ↳ Depkimpraswil ↳ Bakodurtanal ↳ pemda ↳ Dephut * ↳ Depperindag ↳ BPPN ↳ Dephut * ↳ Depkimpraswil ↳ Deptan ↳ Depnakertrans ↳ BPPT ↳ Pemda
5.	Pengembangan perkebunan	↳ Pengembangan perkebunan kelapa sawit	↳ Kalimantan ↳ Sulawesi	↳ Mulai Tahun 2003	↳ Deptan * ↳ Depnakertrans ↳ Dephut ↳ Depperindag ↳ BPPT ↳ BPN ↳ Pemda

		↳ Rehabilitasi dan pengembangan perkebunan kelapa.	↳ Sulawesi ↳ Maluku ↳ Kalbar	↳ Mulai Tahun 2003	↳ Deptan * ↳ Depper indag ↳ Pemda ↳ NTT dan NTB
6.	Pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	↳ Pengembangan sawah beririgasi teknis.  ↳ Relokasi pabrik sarana produksi pertanian dari Jawa  ↳ Peningkatan distribusi pupuk dan obat-obatan  ↳ Pengembangan tanaman buah-buahan tropis.	↳ Sulawesi ↳ Papua ↳ NTT dan NTB  ↳ Sulawesi ↳ Kalimantan  ↳ KTI  ↳ KTI	↳ Mulai Tahun 2003  ↳ Mulai Tahun 2003  ↳ Mulai Tahun 2003  ↳ Mulai Tahun 2003	↳ Depkimpraswil * ↳ Deptan ↳ Pemda  ↳ Deptan * ↳ Depperindag ↳ Pemda  ↳ Depperindag * ↳ Dephub ↳ Deptan ↳ Pemda  ↳ Deptan * ↳ Kem. Ristek ↳ BPPT/LIPI ↳ Pemda.

**TABEL 4.3.**  
**PROGRAM PRIORITAS BIDANG PRASARANA DAN SARANA**

No	Program	Kegiatan	Wilayah	Waktu Pelaksanaan	Instansi Terkait (* Koodinator)
1.	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan nasional.	↳ Penyelesaian jalan lintas Kalimantan  ↳ Penyelesaian jalan lintas Sulawesi  ↳ Pengembangan jalan antar kabupaten/kota terutama pada 11 wilayah pengembangan di Papua.	↳ Kalimantan  ↳ Sulawesi  ↳ Papua	↳ Selesai tahun 2004  ↳ Selesai tahun 2005  ↳ Mulai Tahun 2003	↳ Depkimpraswil * ↳ Dephub ↳ Pemda  ↳ Depkimpraswil * ↳ Dephub ↳ Pemda  ↳ Depkimpraswil * ↳ Dephub ↳ Pemda
2.	Perintian pembangunan jalur api kereta	↳ Penyelesaian studi lanjutan rencana induk konstruksi jalan kereta api lintas Kalimantan  ↳ Studi pembangunan jalan kereta api lintas Sulawesi  ↳ Studi pembangunan jalan kereta api lintas Papua	↳ Kalimantan  ↳ Sulawesi  ↳ Papua	↳ Selesai Tahun 2004  ↳ Mulai Tahun 2003  ↳ Mulai Tahun 2003	↳ Dephub * ↳ Kem. BUMN ↳ Bakosurtanal ↳ Pemda  ↳ Dephub * ↳ Kem. BUMN ↳ Pemda  ↳ Dephub * ↳ Kem. BUMN ↳ Pemda
3.	Sitem transportasi nasional	↳ Revisi tataran transportasi nasional.  ↳ Revisi tataran transportasi wilayah dan lokal	↳ Indonesia  ↳ Indonesia	↳ Selesai Tahun 2003  ↳ Mulai Tahun 2004	↳ Dephub * ↳ Depkimpraswil ↳ Pemda  ↳ Dephub * ↳ Depkimpraswil ↳ Pemda
4.	Peningkatan dan pembangunan pelabuhan.	↳ Lanjutan peningkatan kapasitas pelabuhan ekspor.  ↳ Penetapan pelabuhan ekspor.	↳ Bitung, Kupang, Pontianak, makasar, Balikpapan, Jayapura dan Sorong	↳ Mulai Tahun 2003	↳ Dephub * ↳ Kem. BUMN ↳ Pemda

			↓ Biak ↓ P. Temojo	↓ Selesai Tahun 2003	↓ Dephub * ↓ Pemda
5.	Penyediaan pelayanan angkutan perintis.	↓ Pemberian fasilitas bagi angkutan perintis darat, laut dan udara  ↓ Pengadaan kapal perintis penyebrangan dan kapal perintis laut dgn memanfaatkan produk dlm negeri  ↓ Pencegahan praktek monopoli angkutan perintis  ↓ Pemberian fasilitas bagi pengoperasian/pengadaan sarana angkutan masyarakat di daerah terpencil.	↓ KTI  ↓ KTI  ↓ KTI  ↓ KTI	↓ Mulai Tahun 2003  ↓ Mulai Tahun 2003  ↓ Mulai Tahun 2003  ↓ Mulai Tahun 2003	↓ Dephub * ↓ Pemda  ↓ Dephub * ↓ Kem. BUMN ↓ Pemda  ↓ Dephub * ↓ Depkeu ↓ Kem. BUMN ↓ Pemda ↓ Dephub * ↓ Depkeu ↓ Pemda
6.	Penambahan kapasitas bandara	↓ Optimalisasi pemanfaatan bandara untuk penerbangan malam hari.	Mataram, Kupang, Pontianak, palu, Kendari, Ambon, Jayapura dan Sorong	↓ Mulai Tahun 2003	↓ Dephub * ↓ Kem. BUMN ↓ Pemda
7.	Pengembangan energi	↓ Peningkatan jaringan distribusi tenaga listrik  ↓ Penyiapan pedoman pelaksanaan penjualan listrik swasta  ↓ Identifikasi kebutuhan pembangunan depo BBM di KTI  ↓ Pembangunan dan perluasan PLTP dan PLTA	↓ KTI  ↓ KTI  ↓ KTI  ↓ KTI	↓ Mulai Tahun 2003  ↓ Mulai Tahun 2003  ↓ Mulai Tahun 2003  ↓ Mulai Tahun 2003	↓ DESDM * ↓ Kem. BUMN ↓ Pemda  ↓ DESDM *  ↓ DESDM * ↓ Pertamina  ↓ DESDM * ↓ Dephut ↓ Kem. BUMN
8.	Pengembangan sumberdaya energi alternatif	↓ Pengembangan energi yang memanfaatkan sumberdaya lokal	↓ Sulawesi ↓ Papua ↓ NTT ↓ Kalbar	↓ Mulai Tahun 2003	↓ DESDM * ↓ BPPT ↓ LAPAN ↓ LIPI
9.	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi	↓ Pengkajian kemungkinan pemberlakuan peraturan-peraturan khusus berkenaan dengan perkembangan teknologi komunikasi.  ↓ Pengembangan dan pemanfaatan jaringan teknologi komunikasi dan informasi	↓ KTI  ↓ KTI	↓ Mulai Tahun 2003  ↓ Mulai Tahun 2003	↓ DESDM * ↓ Kem. Kominfo ↓ Kem. Ristek ↓ Pemda  ↓ DESDM * ↓ Kem. Kominfo ↓ Kem. Ristek ↓ BPPT ↓ Pemda
10.	Pengembangan wilayah	↓ Pembangunan pusat perdagangan untuk produk-produk unggulan  ↓ Peningkatan aksesibilitas daerah tujuan wisata  ↓ Penetapan wilayah	↓ Makasar ↓ Manado ↓ Biak ↓ Balikpapan  ↓ KTI  ↓ Pontianak,	↓ Mulai Tahun 2003  ↓ Mulai Tahun 2003  ↓ Selesai	↓ Depperindag * ↓ Deptan ↓ Kem. KUKM ↓ Pemda  ↓ Dephub * ↓ Depkimpraswil ↓ Bakosurtanal ↓ Kem. Budpar  ↓ Kem. PPN/Bappenas *

		<p>pengembangan strategis</p> <p>↳ Pengembangan kawasan sentra produksi</p> <p>Pengembangan wilayah perbatasan</p>	<p>Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Manado, bitung, Makassar, Biak, Timika dan Kupang</p> <p>↳ KTI</p> <p>Kalimantan Papua NTT</p>	<p>Tahun 2003</p> <p>↳ Mulai Tahun 2003</p> <p>Mulai Tahun 2003</p>	<p>↳ Depkimpraswil</p> <p>↳ Pemda</p> <p>↳ Depperindag *</p> <p>↳ Deptan</p> <p>↳ Depkimpraswil</p> <p>↳ Dephub</p> <p>↳ Kem. KUKM</p> <p>↳ Pemda</p> <p>Depkimpraswil</p> <p>Depdagri</p> <p>Dephub</p> <p>Dephan</p> <p>Deplu</p> <p>Depkeu</p> <p>Bakosurtanal</p>
11	Pemberian Insentif di bidang transportasi	<p>Pemberian kemudahan perijinan</p> <p>Pemberian insentif pada rute tertentu</p> <p>Penyediaan dana penjaminan untuk pengadaan sarana transportasi</p> <p>Pembiayaan khusus bagi pengembangan pelayaran rakyat</p>	<p>KTI</p> <p>KTI</p> <p>KTI</p> <p>KTI</p>	<p>Mulai Tahun 2003</p> <p>Mulai Tahun 2003</p> <p>Mulai Tahun 2003</p> <p>Mulai Tahun 2003</p>	<p>Dephub</p> <p>Pemda</p> <p>Dephub</p> <p>Depkeu</p> <p>Depkeu</p> <p>Dephub</p> <p>Dephub</p> <p>Depkeu</p> <p>Pemda</p>

**Tabel 4.4.**

**Program Prioritas Bidang Kelembagaan**

No.	Program	Kegiatan	Wilayah	Waktu Pelaksanaan	Instansi Terkait (*Koordinator
1.	Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	<p>Penataan dan pengaturan organisasi lembaga pemerintahan daerah sesuai dgn kebutuhan daerah</p> <p>Sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan otonomi daerah</p> <p>Optimalisasi pelaksanaan kewenangan daerah berdasarkan azas dekon-</p>	<p>KTI</p> <p>KTI</p> <p>KTI</p>	<p>Mulai Tahun 2003</p> <p>Mulai Tahun 2003</p> <p>Mulai Tahun 2003</p>	<p>Kem. PAN</p> <p>Depdagri</p> <p>Pemda</p> <p>Depdagri</p> <p>Departemen/ LPND terkait</p> <p>Depdagri</p> <p>Departemen/ LPND terkait</p>

		<p>sentralisasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi pemda</p> <p>Peningkatan koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Pemerintah daerah</p> <p>Harmonisasi peraturan dan perundangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah</p> <p>Pelaksanaan hubungan luar negeri oleh Pemerintah .</p> <p>Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam lokal.</p> <p>Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan daerah berdasarkan kewenangannya.</p>	<p>KTI</p> <p>KTI</p> <p>KTI</p> <p>KTI</p> <p>KTI</p>	<p>Mulai 2003</p> <p>Mulai 2003</p> <p>Mulai 2003</p> <p>Mulai 2003</p> <p>Mulai 2003</p>	<p>Tahun</p> <p>Tahun</p> <p>Tahun</p> <p>Tahun</p> <p>Tahun</p>	<p>Depdagri Pemda</p> <p>Depdagri Pemda</p> <p>Deplu Depdagri Pemda</p> <p>Depdagri DKP Dephut Depstan DESDM</p> <p>Depkeu Pemda</p>
2.	Penguatan kemampuan keuangan daerah	<p>Pengoptimalan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dengan menghindari biaya ekonomi tinggi.</p> <p>Peningkatan kewenangan pemberian pagu kredit lembaga perbankan</p> <p>Pemberian prioritas bagi Pemda yg berminat mengambil alih/menyertakan saham pada perusahaan eks BPPN.</p> <p>Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) percepatan pembangunan.</p> <p>Pengembangan lembaga penjaminan untuk percepatan pembangunan.</p>	<p>KTI</p> <p>KTI</p> <p>KTI</p> <p>KTI</p> <p>KTI</p>	<p>Mulai 2003</p> <p>Mulai 2003</p> <p>Mulai 2003</p> <p>Mulai 2003</p> <p>Mulai 2003</p>	<p>Tahun</p> <p>Tahun</p> <p>Tahun</p> <p>Tahun</p> <p>Tahun</p>	<p>Depkeu Depdagri Kem. BUMN Pemda</p> <p>Depkeu Perbankan</p> <p>Kem. BUMN Pemda</p> <p>Depkeu Depdagri Kem. PPN/ Bappenas</p> <p>Kem.KUKM Depkeu Depperindag</p>
3.	Peningkatan kerjasama antar lembaga di daerah	<p>Penyusunan sistem pelayanan perijinan dan sistem informasi.</p> <p>Pendirian pusat informasi dan pasar komoditas unggulan dg memanfaatkan</p>	<p>KTI</p> <p>KTI</p>	<p>Mulai 2003</p> <p>Mulai 2003</p>	<p>Tahun</p> <p>Tahun</p>	<p>BKPM Dephub Kem. Kominfo Pemda</p> <p>Depperindag Dephub</p>

		<p>berbagai sumber data.</p> <p>Optimalisasi forum kerjasama antar daerah</p> <p>Pembentukan forum antar lembaga di masyarakat maupun antar masyarakat dg pemerintah dan dunia usaha.</p> <p>Peningkatan peran komite kerjasama daerah perbatasan untuk menangani masalah-masalah perbatasan.</p>	<p>KTI</p> <p>KTI</p> <p>Kalimantan Papua NTT</p>	<p>Mulai 2003</p> <p>Mulai 2003</p> <p>Mulai 2002</p>	<p>tahun</p> <p>Tahun</p> <p>Tahun</p>	<p>Kem. KUKM Kem. Kominfo Kem. Ristek BPPT LIPI Pemda</p> <p>Depdagri Pemda</p> <p>Depdagri Kem. KUKM Pemda</p> <p>Depdagri Dephub Depku Depkeh dan HAM Dephan Mabes TNI Bakosurtanal Polri</p>
4.	Pengembangan Kapasitas organisasi kelembagaan ekonomi, sosial dan budaya	<p>Peningkatan koordinasi antara KAPET dg Pemerintah Daerah</p> <p>Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan – kelembagaan yang terkait dg Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR).</p> <p>Peningkatan kerjasama antar daerah untuk pengawasan laut (12 mil).</p> <p>Peningkatan pengawasan lintas batas antar negara.</p> <p>Pelibatan masyarakat melalui program pengembangan KUKM dan kelembagaan lainnya.</p>	<p>KTI</p> <p>KTI</p> <p>KTI</p> <p>Kalimantan Papua NTT</p> <p>KTI</p>	<p>Mulai 2003</p> <p>Mulai 2003</p> <p>Mulai 2003</p> <p>Mulai 2002</p> <p>Mulai 2003</p>	<p>Tahun</p> <p>Tahun</p> <p>Tahun</p> <p>Tahun</p> <p>Tahun</p>	<p>Bapeng. KAPET Depkimpraswil Dephub Pemda</p> <p>Tim Koor KESR Depkimpraswil Depku Depdagri Depperindag Pemda</p> <p>Depdagri Dephub Dephan DKP TNI AL Polri Pemda</p> <p>Depku Depdagri Dephut Dephan Depku Bakosurtanal Polri Pemda</p> <p>Kem. KUKM Depdiknas Depsos Depnakertrans Deptan DESDM</p>



					Dephub Depkimpraswil Kem BUMN
5.	Penciptaan iklim yang mendukung kegiatan kelembagaan ekonomi, sosial, dan budaya.	Penyusunan dan sosialisasi kegiatan yg mendukung pengembangan kelembagaan ekonomi, sosial, dan budaya.	KTI	Mulai 2003	Tahun <b>Kem KUKM</b> Depdagri Depsos Depkeu Pemda
		Pemberian insentif untuk mendorong investasi.	KTI	Mulai 2003	Tahun <b>BKPM</b> Depkeu Pemda
		Penyederhanaan peraturan kelembagaan ekonomi, sosial, dan masyarakat.	KTI	Mulai 2003	Tahun <b>Kem KUKM</b> Depdagri Depkeh dan HAM Depkeu Depsos Pemda
		Peningkatan peran lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan	KTI	Mulai 2003	Tahun <b>Depkeu</b> Pemda

## BAB V PENUTUP

Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan KTI ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan KTI, agar pada tahun 2010 kesenjangan pembangunan antara KTI dengan KBI dan intra KTI dapat dihilangkan. Keberhasilan dari tujuan di atas tergantung kepada sikap mental, tindak, semangat, ketaan, profesionalisme, disiplin, dan komitmen dari semua pelaku pembangunan di KTI. Untuk itu, pemerintah perlu sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan dan strategi yang tertuang dalam Jakstranas Percepatan Pembangunan KTI ini.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU  
KETUA DEWAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN TIMUR INDONESIA**

ttd

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

### Daftar Singkatan

No.	Singkatan	Uraian
1.	AIDA	Australia Indonesia Development Area
2.	ASEAN	Association of South East Asia Nation

3.	BAKOSURTANAL	Badan Koordinasi Survey Pemetaan Nasional
4.	Bapeng KAPET	Badan Koordinasi Survey Pemetaan Nasional
5.	BATAM	Badan Tenaga Atom Nasional
6.	BBM	Bahan Bakar Minyak
7.	BIMP-EAGA	Brunei Indonesia Malaysia Philippines-East Asean Growth Area
8.	BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
9.	BKTRN	Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional
10.	BLKI	Balai Latihan Kerja Industri
11.	BPN	Badan Pertanahan Nasional
12.	BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
13.	BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
14.	Depag	Departemen Agama
15.	Depdagri	Departemen Dalam Negeri
16.	Depdiknas	Departemen Pendidikan Nasional
17.	Dephan	Departemen Pertahanan Nasional
18.	Dephub	Depratemen Perhubungan
19.	Dephut	Departemen Kehutanan
20.	Depkeh dan HAM	Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia
21.	Depkes	Departemen Kesehatan
22.	Depkeu	Departemen Keuangan
23.	Depkimpraswil	Depertemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah
24.	Deplu	Departemen Luar Negeri
25.	Depnakertrans	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
26.	Depperindag	Departemen Perindustrian dan Perdagangan
27.	Depsos	Departemen Sosial
28.	Deptan	Departemen Pertanian
29.	DESDM	Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral
30.	DKP	Departemen Kelautan dan Perikanan
31.	GBHN	Garis-garis Besar Haluan Negara
32.	IMS-GT	Indonesia Malaysia Singapura- Growth Triangle
33.	IPD	Indeks Pembangunan Daerah
34.	IPM	Indeks Pembangunan Manusia
35.	Jakstranas	Kebijakan dan Strategi Nasional
36.	Jamsostek	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
37.	Kalbar	Kalimantan Barat
38.	Kaltim	Kalimantan Timur
39.	KBI	Kawasan Barat Indonesia
40.	Kem. Budpar	Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata
41.	Kem. BUMN	Kementrian Badan Usaha Milik Negara
42.	Kem. Kominfo	Kementrian Komunikasi dan Informasi
43.	Kem. KUKM	Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
44.	Kem LH	Kementrian Lingkungan Hidup
45.	Kem PAN	Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara
46.	Kem. PPKTI	Kementrian Percepatan Pembangunan Kawasan

		Timur Indonesia
47.	Kem. PPN/Bappenas	Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
48.	Kem Ristek	Kementrian Riset dan Teknologi
49.	KESR	Kerjasama Ekonomi Sub-Regional
50.	KTI	Kawasan Timur Indonesia
51.	LAPAN	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
52.	LIPI	Lembag Ilmu Pengetahuan Indonesia
53.	LPND	Lembaga Pemerintahan Non Departemen
54.	NKRI	Negara kesatuan Republik Indonesia
55.	No.	Nomor
56.	NTB	Nusa Tenggara Barat
57.	NTT	Nusa Tenggara Timur
58.	PDRB	Pendapatan Domestik Regional Bruto
59.	Pemda	Pemerintah Daerah
60.	PLN	Perusahaan Listrik Negara
61.	PLTA	Pembangkit Listrik Tenaga Air
62.	PLTM	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
63.	PLTP	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
64.	PMA	Penanaman Modal Asing
65.	PMDK	Penelusuran Minat dan Kemampuan
66.	PMDN	Penanaman Modal DalamNegeri
67.	Polri	Polisi Republik Indonesia
68.	PP	Peraturan Pemerintah
69.	PPKTI	Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
70.	PT	Perseroan Terbatas
71.	PTN	Perguruan Tinggi Negeri
72.	Rp.	Rupiah
73.	RTRWN	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
74.	SD	Sekolah Dasar
75.	SDA	Suber Daya Alam
76.	SDM	Sumber Daya Manusia
77.	SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
78.	SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
79.	SPP	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan
80.	Sulut	Sulawesi Utara
81.	UKM	Usaha Kecil dan Menengah
82.	Universitas/PT	Universitas/Perguruan Tinggi

